

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Dicka Bella Murtika Sari^{1*}, Anita Wiyanti², Endang Masitoh³

^{1,2,3}Progam Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jalan. KH. Agus Salim No.10 Surakarta

*Email: dickabella03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Responden dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala sub bagian keuangan dan staf pegawai keuangan sebanyak 64 sampel yang berada di 6 dinas Kota Surakarta. Dimana data yang dikumpulkan melalui metode kuesioner yang disebar. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan terdapat pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: *SDM (Sumber Daya Manusia), SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)*

1. PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan adanya tuntutan masyarakat yang semakin banyak, mendorong para penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih baik. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan nasional, diperlukan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan (BPK RI, 2013).

Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas penting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dua tugas itu adalah (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut (BPK RI, 2013).

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Selain sistem pengendalian intern pemerintah, untuk mencapai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009:221) yaitu kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, di mana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan (Halim, 2004:74).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada perluasan sampel dan lokasi penelitian. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Saleba (2014) dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

2. METODOLOGI

2.1. Jenis Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kepala Dinas, Kepala Sub-bagian Keuangan dan staf bagian keuangan pada 6 Dinas Kota Surakarta. Ruang lingkupnya membahas seberapa jauh pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel independen yaitu (X) yang terdiri dari:
 - 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)
 - 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)
- b. Variabel dependen yaitu Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan peneliti dalam mengoperasionalkan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik (Indriantoro dan Supomo, 2002). Definisi operasional dalam variabel ini yang kemudian diuraikan menjadi indikator meliputi :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya (Havesi, 2005 dalam Indriasari, 2008).
3. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

2.3. Sumber Data dan Responden

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan berupa daftar pertanyaan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan mengakses website dan situs-situs tertentu. Dan respondennya adalah Kepala Dinas, Kepala Sub-bagian Keuangan dan staf bagian keuangan.

2.4. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah 6 Dinas Kota Surakarta. Adapun sampel dalam penelitian adalah Kepala Dinas, Kepala Sub-bagian Keuangan dan staf bagian keuangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan kriteria didasarkan pada alasan bahwa Kepala Dinas sebagai pengawas dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern dan Kepala Sub-bagian Keuangan dan staf bagian keuangan yang menjalankan sistem pengendalian intern dan Kepala dinas Sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 sampel.

2.5. Teknik Pengambilan Sampel

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap, maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Menggunakan data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner.
2. Penelitian kepustakaan.
3. Mengakses *website* dan situs-situs resmi tertentu.

2.6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama kuesioner berisi pertanyaan mengenai identitas responden, bagian kedua dari kuesioner berisi pernyataan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diambil dari Zalni (2013). Bagian ketiga dari kuesioner berisi pernyataan mengenai kompetensi sumber daya manusia yang diambil dari Fadilah (2013). Serta bagian keempat berisi pertanyaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang diambil dari Suprayogi (2010). Untuk skor berupa: SR (Sering), SL (Selalu), KK (Kadang-Kadang), P (Pernah), TP (Tidak Pernah).

2.7. Teknik Analisis dan Uji Regresi Linear Berganda

Teknik Pengujian Kualitas Data

Dalam penelitian ini untuk menguji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dalam pengukuran variabel. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dengan bantuan program SPSS versi 19.0.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Validitas

Validitas merupakan alat ukur yang dapat mengukur ketepatan, kecermatan, dan ketelitian terhadap sesuatu yang ingin diukur. Dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan nilai *Correlated Item – Total Correlation*. Nilai r hitung yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan nilai r tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian sangat valid, yang ditunjukkan dengan nilai masing-masing item pertanyaan lebih besar dari $r_{tabel} = 0,246$ dengan nilai r_{tabel} untuk $n = 64$.

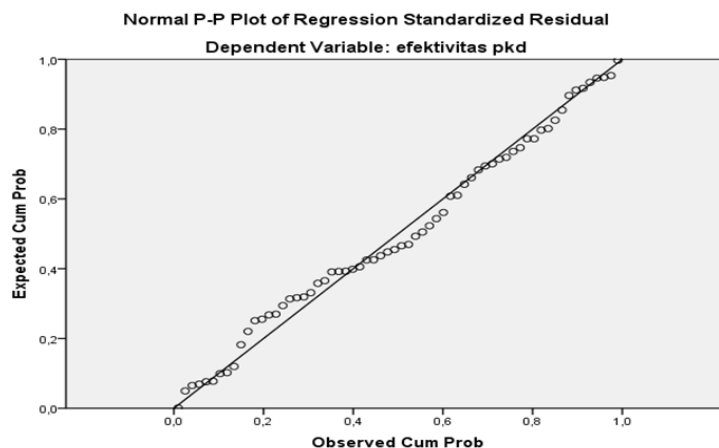
3.2. Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik *Cronbach Alpha*. Jika nilai hitung *cronbach's alpha* besar dari 0,60 maka instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel (handal). Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian grafik *P-P Plot* untuk pengujian residual model regresi yang terlihat pada gambar 1. dibawah ini:



Gambar 1. Normal Probability Plot

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SPIP	,950	1,052
Kom.Sdm	,950	1,052

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* yang lebih kecil dari 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

3.4. Uji Regresi Linear Berganda

Model Regresi

Model regresi bertujuan untuk menganalisis hubungan linear antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Model Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	5,397	4,375	
SPIP	,205	,065	,282
kompetensi sdm	,578	,085	,612

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persamaan regres linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 5,397 + 0,205 X_1 + 0,578 X_2 + e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Efek.PKD* (Konstanta = α) sebesar 5,397 mempunyai arti apabila semua variabel independen sama dengan nol, maka *Efek.PKD* bernilai sebesar 5,397.
- 2) *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* = X_1 mempunyai koefisien regresi sebesar 0,205 , mempunyai arti setiap kenaikan *SPIP* 1 satuan maka naik sebesar 0,205 dengan asumsi faktor-faktor yang lain nilainya tetap.
- 3) *Kompetensi Sumber Daya Manusia* = X_2 mempunyai koefisien regresi sebesar 0,578 mempunyai arti setiap kenaikan *Kom.SDM* 1 satuan maka naik sebesar 0,578 dengan asumsi faktor-faktor yang lain nilainya tetap.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau dikenak sebagai Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikansi berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	F hitung	F tabel	Sig	Prob	Keterangan
EfekPKD	34,472	3,148	0,000	< 0,05	Model layak digunakan

Hasil perhitungan pada tabel 3.2 diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($34,472 > 3,148$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain variabel independen SPIP dan Kompetensi SDM layak untuk digunakan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing – masing variabel. Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen (SPIP dan Kompetensi SDM) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Efektivitas PKD). Uji t menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Probability	Keterangan
SPIP	3,136	1,670	0,003	0,05	H1 diterima
Kompetensi SDM	6,796	1,670	0,000	0,05	H2 diterima

Hipotesis 1 :

Hasil perhitungan pada tabel 3.3 diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,136 > 1,670$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$). Maka hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain variabel independen (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 diterima.

Hipotesis 2 :

Hasil perhitungan pada tabel 3.2 diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel ($6,796 > 1,670$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Maka hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain variabel independen (Kompetensi SDM) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hipotesis 2 diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat, atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *R-Square* atau *Adjusted R-Square*. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel	R Square	Keterangan
Efektivitas PKD	0,531	Variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen

Hasil dari pengujian koefisien determinasi (R^2) dapat diperoleh nilai *R Square* menunjukkan 0,531 atau 53,1%. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel SPIP dan Kompetensi SDM, sedangkan sisanya 46,9% efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh variabel–variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik pada hipotesis pertama ditemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Surakarta. Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan komunikasi atas informasi secara efektif.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik pada hipotesis kedua membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Surakarta. Adanya kompetensi sumber daya manusia memiliki kemampuan atau pengetahuan dibidang teknologi informasi serta memiliki keahlian teknis dan fungsional maka organisasi suatu pemerintah mampu mencapai keefektifitasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia maka suatu organisasi pemerintah mampu menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. Serta mampu mewujudkan tujuan bersama yaitu dalam menyajikan laporan keuangan daerah secara efektif dan transparan hal ini didukung oleh beberapa faktor seperti keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability).

4.2. Keterbatasan:

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di 6 (enam) dinas dengan jumlah 64 sampel dan hasilnya tidak bisa digeneralisasikan di Dinas yang lain.
2. Dalam penelitian ini hanya terdapat dua variabel independen.
3. Variabel yang mempengaruhi variabel Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) dari 2 variabel X_1 dan X_2 (sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia) yang diteliti hanya sebesar 53,1% sedangkan sisanya 46,9% variabel Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.3. Saran:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan jumlah responden yang memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian pada penelitian selanjutnya.
2. Untuk metode penelitian selanjutnya diharapkan menambah beberapa metode penelitian seperti wawancara dan observasi. Dengan penambahan metode tersebut memungkinkan data yang diperoleh akan berbeda.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independennya dengan harapan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. *Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013*, (Online), (<http://www.bpk.go.id/>, diakses 22 Oktober 2016, pukul 13.10).
- Fadilah, Mailani. 2013. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, (Online), (<http://repository.upi.edu/>, diakses 22 Oktober 2016, pukul 14.30).
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir) Pontianak : *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Indriantoro, dan Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPEE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Online), (www.bappenas.go.id/, diakses 28 Oktober 2016, pukul 22.15).

- Saleba, Siti Nurjannah, 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada 6 Dinas Di Kabupaten Baubau, Makasar). Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tuasikal. A. 2007. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 08, No. 01, pp.1466-148.
- Zalni, Fitri. 2013. *Pengaruh Komitmen Karyawan Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Online), (<http://ejournal.unp.ac.id/>, diakses pada 2 November 2016, pukul 22.19).